

PENDIDIKAN DAN NASIONALISME

MAKALAH

disampaikan dalam Seminar Nasional “Pendidikan dan Nasionalisme”
Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Jawa Barat Bekerja
Sama dengan Program Studi Ilmu Sejarah Fak. Sastra Universitas Padjadjaran
di Kampus Fak. Sastra Unpad Jatinangor tanggal 18 Mei 2011

oleh:

Mumuh Muhsin Z



**JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR.
2011**

PENDIDIKAN DAN NASIONALISME¹

oleh:

Mumuh Muhsin Z.²

Abstrak

Nasionalisme di Indonesia lahir ketika penduduk negeri ini berada di bawah pemerintahan jajahan Belanda. Ideologi ini muncul menjadi sebuah kesadaran kolektif dipicu oleh perasaan senasib di masa lalu dan di masa yang sedang dijalani; dan yang lebih penting lagi adalah dipersatukan oleh cita-cita yang sama untuk masa depan. Ideologi ini mewujud menjadi sebuah kenyataan yang akhirnya menjadi sebuah Negara dipercepat oleh gerakan pendidikan.

Secara dialektis dapat dikatakan bahwa penerapan Politik Ets lebih banyak merupakan sikap antitesis terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan politik Pemerintah Belanda yang diterapkan sebelumnya, yakni Politik Kolonial Konservatif dan Politik Kolonial Liberal. Kritik-kritik tajam yang dilancarkan oleh kelompok Ets ini lebih banyak tertuju pada tingkat kesejahteraan yang semakin menurun dari menduduk bumiputera. Dengan demikian, Politik Ets sesungguhnya adalah, secara tidak langsung, pengakuan pemerintah penjajah terhadap akibat penetrasinya ke dalam masyarakat Jawa khususnya dan Nusantara umumnya, yakni suatu masyarakat yang mengalami penurunan yang sangat parah di segala bidang kehidupan.

¹ disampaikan dalam Seminar Nasional "Pendidikan dan Nasionalisme" Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Jawa Barat Bekerja Sama dengan Program Studi Ilmu Sejarah Fak. Sastra Universitas Padjadjaran di Kampus Fak. Sastra Unpad Jatinangor tanggal 18 Mei 2011.

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.

Namun kemudian, pada gilirannya Politik Etis pun tidak mampu membuktikan dirinya sebagai penyelamat tingkat kesejahteraan rakyat itu. Lapangan pendidikan yang merupakan program utama Politik Etis, dalam praktiknya lebih banyak dihubungkan dengan Politik asosiasinya C. Snouck Hurgronje. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah lebih banyak tertuju pada kepentingan-kepentingan politis, bukan semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bumiputera.

Penilaian seperti itu didasarkan pada beberapa alasan; pertama, pendidikan lebih banyak tertuju pada lapisan atas, priyayi; kedua, sistem pendidikan yang dijalankan, termasuk materi pelajarannya, diorientasikan kepada terciptanya manusia "pengabdian" terhadap pemerintah jajahan; ketiga, sementara pemerintah menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab Gubernur Jenderal (IS art. 179 dan art. 182), dan pada saat yang bersamaan pemerintah terpaksa membatasi bahkan mengurangi anggaran belanja untuk pendidikan karena terjadinya krisis ekonomi (1930); adanya inisiatif swasta untuk menyelenggarakan pendidikan bukannya ditanggapi dengan positif tetapi malah disambut dengan dikeluarkannya berbagai aturan yang memberatkan, berupa ordonansi guru dan sekolah liar.

Namun demikian, politik asosiasinya C. Snouck Hurgronje mengalami kegagalan juga. Dengan politik asosiasi itu – di mana pendidikan menjadi instrument utamanya – di satu pihak semakin terbukanya lapangan pendidikan bagi golongan priyai yang konsekuensinya banyak melahirkan golongan intelektual yang termasuk golongan elite baru dalam masyarakat; di lain pihak pemerintah tidak mampu menampung mereka dalam lingkungan birokrasi kekuasaannya. Hal ini melahirkan kelompok intelektual yang radikal dalam melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah dan menentang kolonialisme.

Di samping itu, banyak di antara mereka yang melibatkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan yang di dalamnya dihembuskan nafas-nafas pembaharuan dan membangkitkan kesadaran nasional.

Selain hal tersebut di atas, gerakan dalam lapangan pendidikan pun giat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang sosial-pendidikan keagamaan (Islam), sehingga memberi warna terhadap haluan pendidikan yang dikelolanya.

Sebenarnya, kegiatan pendidikan keagamaan (Islam) sudah merupakan fenomena yang cukup tua di Indonesia, namun dalam bentuk yang masih sederhana dan tradisional. Misalnya, pengajian yang diselenggarakan di masjid, langgar, atau rumah-rumah kyai, juga pesantren. Sesuai dengan lajunya perkembangan zaman, jenis-jenis pendidikan semacam itu banyak yang dimodifikasi, sehingga lahirlah madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah dengan sistem klasikalnya dan memasukkan materi-materi pelajaran umum.

Munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang berhaluan agama dengan corak modern ini dimungkinkan oleh beberapa hal. Pertama, faktor intern, yakni pada awal abad ke-20 animo masyarakat untuk memasuki sekolah ini kian meningkat, sementara sekolah yang ada sangat terbatas, dalam arti terbatas fasilitasnya dan terbatas pada golongan masyarakat tertentu. Selanjutnya, sekolah-sekolah pemerintah dan sekolah-sekolah swasta yang umumnya dikelola oleh para missionaris dianggap sebagai sekolahnya orang-orang kafir. Masyarakat pribumi khawatir untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah itu karena akan merusak aqidah (keimanan) mereka. Kedua, faktor ekstern, yakni banyaknya jumlah ulama yang menunaikan ibadah haji ke Makkah dan mereka bermukim di sana beberapa tahun sambil memperdalam ajaran Islam. Sekembalinya dari Makkah mereka giat melancarkan pembaharuan-pembaharuan dalam berpikir, berpolitik, dan dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikan.

Islam sebagai agama telah memberikan *a sense of unity* dan *a sense of identity* kepada rakyat, bahkan mampu membangkitkan secara besar-besaran sentimen nasional dan membina bentuk solidaritas yang efektif. Oleh karena itu tidak heran jika munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam lebih banyak dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan pemerintah.

Setelah munculnya pergerakan nasional, di mana pandangan politik masyarakat mulai kritis, keberadaan golongan intelektual pun mempunyai bobot politis. Mereka menilai sistem pendidikan kolonial tidak memberikan kesejahteraan rakyat. Dengan bekerja sebagai guru pada sekolah milik pemerintah kolonial, ini berarti mereka takut mempertahankan sistem pendidikan penjajah. Kesadaran politik mereka yang tidak mau terikat pada sistem pendidikan kolonial mendorong mereka untuk mendirikan lembaga pendidikan non-pemerintah. Ada sekolah yang mendasarkan diri pada agama, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Ummat Islam, al-Irsyad, Persatuan Islam, dan sebagainya. Ada sekolah yang "netral", artinya tidak terikat pada agama, misalnya Sekolah Taman Siswa, Bale Paiwulangan Pasundan, Ksatrian Instituut, Sekolah Sarekat Islam, dan sebagainya.

Banyak nasionalis yang ingin memanfaatkan sekolah untuk mendidik politik rakyat. Masuknya kaum nasionalis ke dunia pendidikan mampu memperkuat dan menambah vitalitas idealisme mereka. Di sini mereka memperkuat basis gerakan. Kelompok nasionalis membentuk perguruan rakyat yang ditujukan kepada penduduk yang sebelumnya tak pernah masuk sekolah. perguruan itu ternyata kemudian lebih merupakan "sekolah politik" dan dijadikan sebagai media perjuangan menuju Indonesia merdeka.

DAFTAR SUMBER

- Dewantara, Ki Hadjar. 1962.
Karja Ki Hadjar Dewantara Pendidikan. Jogjakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- _____. 1964.
Asas-asas dan Dasar-dasar Taman Siswa. Tjetakan III. Jogjakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1984.
Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES.
- Djumhur, I. Dan H. Danasuparta. 1976.
Sejarah Pendidikan. Bandung: Ilmu.
- Kohn, Hans. 1976.
Nasionalisme; Arti dan Sejarahnya (Nationalism: It's Meaning and History). Terjemahan Sumantri Mertodipuro. Jakarta: Pembangunan.
- Kuntowidjojo. 1985.
"Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah", dalam Amien Rais *et al.* (ed.). 1985. *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial; Saresehan Pimpinan dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah*. Yogyakarta: PLP2M.
- Nasution, S. 1983.
Sejarah Pendidikan Indonesia. Bandung: Jemmars.
- Niel, Robert van. 1984.
Munculnya Elite Modern Indonesia (The Emmergence of the Modern Indonesian Elite). Diterjemahkan oleh Zahara Deliar Noer. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Poerbakawatja, Sugarda. 1976.
Ensiklopedi Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung.

Pranata. 1958.

Ki Hadjar Dewantara. Djakarta: Balai Pustaka.

Sais, M. 1981.

Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan. Jakarta: Mutiara.

_____. 1965.

Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia. Mega.

Slametmuljana. 1968.

Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia. Djilid I. Djakarta: Balai Pustaka.

Soetjiatingsih, Sri dan Sutrisno Kutoyo. 1980/ 1981.

Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Ke-budayaan.

Steenbrink, Karel A. 1986.

Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (Pesantren, Madrasah, Sekolah: Recente Ont-wikkelingen in Indonesisch Islam Onderricht). Diterjemahkan oleh Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman. Jakarta: LP3ES.

Suyuthi, Mahsum. 1985.

"Dasar Berpikir Global yang Terecer dari Saresehan Filsafat Pendidikan Muhammadiyah Kembali Tergugat", dalam Amien Rais *et al* (ed.). 1985. *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial; Saresehan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah*. Yogyakarta: PLP2M.

Tsuchiya, Kenji. 1976.

"Gerakan Taman Siswa Delapan Tahun Pertama dan Latar Belakang Jawa Taman Siswa", dalam S. Ichimura

dan Koentjaraningrat (red.). 1976. *Indonesia; Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia.

Vastenhov, M. *et al.* 1977.

Sejarah Pendidikan Indonesia Inleiding tot de Vooroorlogse Paedagogische Prblem van Indonesia. Bandung: Jemmars.